

## E. Kerangka Teori

Untuk memberikan gambaran mengenai kajian yang akan diteliti dalam mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai sarana komunikasi politik dalam menyerap aspirasi masyarakat, maka peneliti akan mengacu kepada kajian yang digunakan sebagai acuan dalam menjelaskan fenomena sosial yang akan dikaji/diteliti adalah sebagai berikut:

### 1. Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi berasal dari kata Latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama disini maksudnya sama makna. Jadi, apabila ada dua orang yang terlibat percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang sedang dibicarakan. Menurut *Hovland* komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang berupa kata-kata.<sup>3</sup> Sedangkan menurut *Dan Nimmo* komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol.<sup>4</sup>

Untuk mengetahui pengertian komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara efektif, para pelaku komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh *Harold Lasswell* dalam karyanya, *The Structure and Function*

<sup>3</sup> Sumarno, A.P, *Dimensi – Dimensi Komunikasi Politik*, P.T. Citra Aditya Bakti, hal:07.

<sup>4</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikasi, Dan Media*, D.T. Dan

of *Communication in Society*, *Lasswell* mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi adalah menjawab pertanyaan sebagai berikut:

***”Who Says What in Which Channel to Whom With What Effect?”***<sup>5</sup>

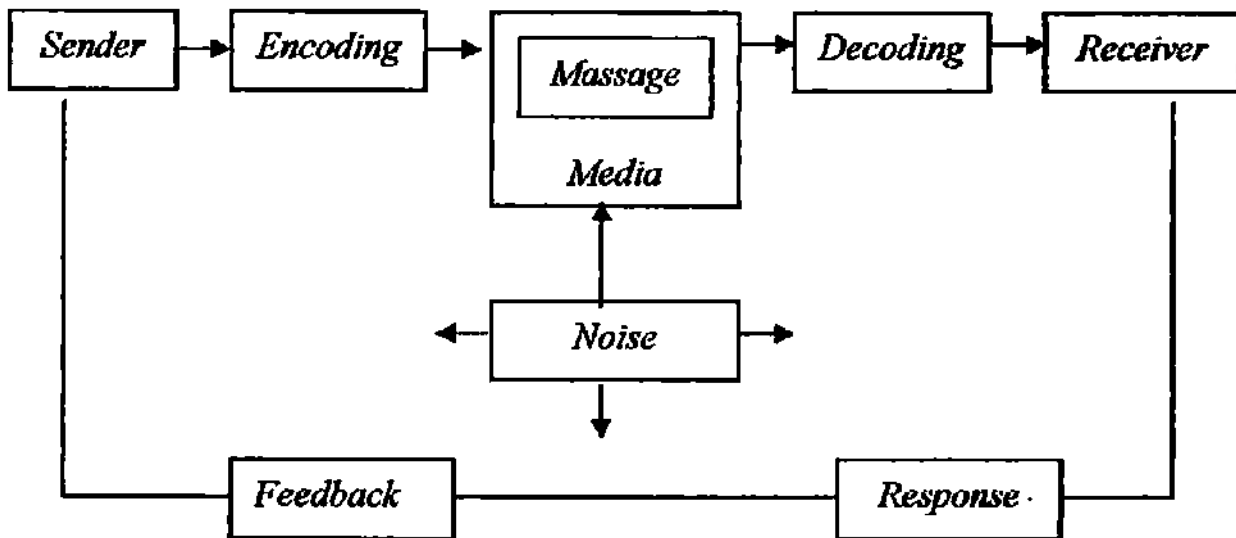
Paradigma *Lasswell* di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan tersebut, yaitu:

- a. Komunikator (*communicator, source, sender*)
- b. Pesan (*message*)
- c. Media (*channel, media*)
- d. Komunikan (*communicant, communicate, receiver, receiptent*)
- e. Efek (*effect, impact, influence*)

Jadi berdasarkan paradigma *Lasswell* tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan).

Proses komunikasi dikatakan efektif apabila memuat beberapa unsur yang paling berkaitan. Unsur-unsur proses komunikasi menurut *Lasswell* secara berurutan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Komunikasi efektif menurut Lasswell.<sup>6</sup>



Penjelasan tentang unsur-unsur dalam proses komunikasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Sender** : Komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang (komunikan).

**Encoding**: Penyandian, yaitu proses pengalihan pikiran menjadi bentuk lambang.

**Message** : Pesan yang merupakan seperangkat lambang yang mempunyai makna yang disampaikan oleh komunikator.

**Media** : Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan.

**Decoding** : Penerjemahan sandi, yaitu proses pemaknaan yang dilakukan oleh komunikan terhadap sandi-sandi (lambang) yang disampaikan oleh komunikator.

**Receiver** : Komunikan, yaitu orang yang menerima pesan dari komunikator.

**Response** : Tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah menerima pesan.

**Feedback** : Umpan balik, tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator.

**Noise** : Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan komunikator kepadanya.

## **2. Komunikasi Politik**

Untuk memahami komunikasi politik harus diperhatikan pengertian-pengertian yang terkandung dalam kedua kata tersebut, yaitu "komunikasi" dan "politik", baik secara teori maupun dalam penerapannya. Pengertian komunikasi menurut beberapa ahli komunikasi telah dijelaskan di atas, sementara pengertian komunikasi politik akan dijelaskan berikut ini:

Secara umum komunikasi politik secara umum adalah proses penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan disemua lapisan masyarakat dan melalui saluran apa saja yang tersedia dan dapat digunakan. Menurut *Mueller* (1973), ia mendefinisikan bahwa komunikasi politik sebagai hasil yang bersifat politik dari kelas sosial, pola bahasa, dan pola sosialisasi.<sup>7</sup> Sedangkan menurut *Galnoor* (1980) mendefinisikan komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial dimana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama d

kekuasaan.<sup>8</sup> Sedangkan *Dan Nimmo* berpendapat bahwa komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi-kondisi konflik.<sup>9</sup>

Komunikasi politik berlangsung sebagai suatu proses penyampaian pesan tertentu yang berasal dari sumber selaku pihak yang memprakarsai komunikasi (masyarakat) kepada khalayak (pemerintah) dengan menggunakan sarana komunikasi politik (Badan Permusyawaratan Desa) untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Komunikasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah, bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa Donoharjo menyerap aspirasi dari masyarakat desa Donoharjo yang kemudian akan disampaikan kepada pemerintah desa dan berusaha memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat dituangkan kedalam bentuk peraturan desa.

Komunikasi politik akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan partisipasi dan sosialisasi politik serta perubahan sikap, serta di dalamnya integritas mental dan loyalitas nasional yang tinggi dari seluruh warga Negeranya. Dalam proses komunikasi yang bagaimanapun bentuknya, baik dalam bentuk yang paling sederhana hingga dalam bentuk yang lebih kompleks tidak akan terlepas dari unsur-unsur komunikasi yaitu: komunikator, komunikan, pesan, media, tujuan, efek dan sumber komunikasi. Komunikator merupakan unsur pertama dari terjadinya suatu proses komunikasi. Dalam komunikasi politik,

---

<sup>8</sup> Galnoor, *Ibid*

<sup>9</sup> *... Nitro PDF Professional: Komunikasi Politik, Komunikasi Desa dan Media, D.T. Dan*

pada suprastruktur politik terdiri dari tiga kelompok, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada ketiga kelompok tersebut biasanya terdiri dari:

- a. Elit politik
- b. Elit militer
- c. Teknokrat
- d. Profesional group.

Menurut *Sumarno, A.P* Infrastruktur adalah merupakan gabungan dari berbagai unsur komunikasi politik, dimana unsur-unsur ini dibagi ke dalam asosiasi-asosiasi atau kelompok-kelompok, yaitu:

- a. Partai Politik (*political party*)
- b. Kelompok kepentingan (*interest group*)
- c. Kelompok penekan (*pressure group*)
- d. Media Komunikasi Politik (*media of political communication*)
- e. Kelompok wartawan (*journalism group*)
- f. Kelompok mahasiswa (*student group*)
- g. Para tokoh politik (*political figures*)<sup>11</sup>

Unsur-unsur yang ada dalam infrastruktur berpengaruh terhadap suprastruktur, yaitu dalam menopang atau melaksanakan segala produk kebijakan suprastruktur. Sosialisasi politik merupakan proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai politik kedalam masyarakat itu sendiri. Proses sosialisasi politik merupakan cara pemberitahuan atau ajakan kepada warga masyarakat mengenai manfaat atau kegunaan sistem politik. Melalui proses ini, maka seorang individu akan belajar memainkan peran politiknya dan dalam proses itu terlibat juga penyerapan atau peniruan sikap-sikap politik yang tepat. Jadi sarana sosialisasi politik membuat anggota masyarakat mengenal, memahami dan menghayati nilai

tertentu yang selanjutnya akan mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya sehari-hari.

### 3. Sistem Politik Pedesaan

Sistem menurut *Pamudji.S* adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.<sup>12</sup>

Sedangkan politik menurut *Miriam Budiarjo* adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.<sup>13</sup> Jadi sistem politik menurut *Robert A. Dahl* adalah pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia yang melibatkan kontrol, pengaruh, wewenang, atau kekuasaan.<sup>14</sup>

Semenjak disahkannya UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yaitu pelimpahan wewenang mengenai pengaturan pemerintahan desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten dan Kota maka secara otomatis sistem politik di Indonesia juga mengalami perubahan. Dengan adanya UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah ini maka secara jelas terlihat pergeseran bentuk sistem politik di negara kita. Sistem desentralistik ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah Kabupaten dan Kota untuk men;

<sup>12</sup> S Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal:9-10.*

<sup>13</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1999, hal:8.*

<sup>14</sup> Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Kekuatan, Yayasan Lentera, Yogyakarta, 1983, hal:2.*

pemerintahan sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat, sehingga terciptanya peluang demokratisasi ditingkat Kabupaten maupun desa. Menurut *Dwipayana dkk*, indikasi perubahan kearah demokratis di tingkat desa terlihat dari beberapa fenomena, yaitu:

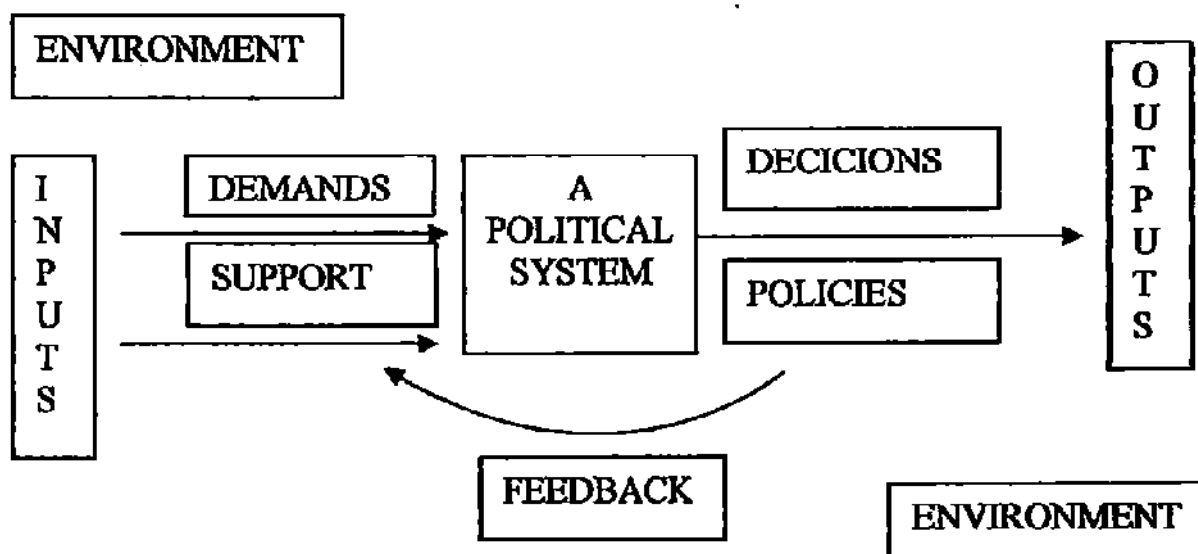
1. Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran, digantikan dengan menguatnya peran institusi masyarakat lokal.
2. Pengadopsian demokrasi delegatif ditingkat desa. Misalnya dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa yang berperan utama sebagai penyerap, penampung, penghimpun aspirasi masyarakat dan menindak lanjutinya kepada pemerintah desa.
3. Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan, artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan desa tidak lagi bermuara dari kebijakan pemerintah pusat secara terpusat (*top down*) melainkan berasal dari aspirasi masyarakat.<sup>15</sup>

Apabila kita mengamati sistem politik di sebuah desa, kita akan mendapati pemerintah desa sebagai salah satu komponen sistem politik di desa tersebut akan melakukan komunikasi politik dengan masyarakatnya ataupun sebaliknya. Apabila komunikasi yang dilakukan antara kedua elemen tersebut tidak baik maka akan sulit terciptanya suasana kehidupan politik yang kondusif. Selain elemen masyarakat dan pemerintah desa, dewasa ini di tingkat pedesaan dibentuk sebuah Badan Permusyawaratan Desa yang diharapkan mampu menjadi saluran komunikasi bagi masyarakat desa kepada pemerintah desa. Harapan pemerintah pusat dengan adanya badan tersebut adalah agar masyarakat mempunyai saluran komunikasi politik untuk menyampaikan aspirasinya, dimana sebelum badan tersebut dibentuk masyarakat di pedesaan hanya bertumpu kepada bapak Dukuh atau tokoh masyarakat/opinion leader yang bertemoat tinggal di daer:



Proses politik dimulai dengan masuknya *input* berupa kepentingan yang diartikulasikan atau dinyatakan oleh masyarakat desa dan diagregasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang bersifat umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sementara itu dalam setiap tahap proses politik itu juga berjalan fungsi-fungsi sosialisasi politik, komunikasi politik dan rekrutmen politik. Demikianlah proses itu berjalan, dari *input* berupa tuntutan kepentingan diubah menjadi *output* berupa kebijakan atau peraturan, yang selanjutnya, melalui saluran umpan balik masuk kembali ke dalam sistem politik dalam wujud kepentingan-kepentingan baru, dan proses barupun dimulai lagi seperti gambar dibawah ini.

Gambar 2: Sistem Politik menurut *Easton*.<sup>16</sup>



Sedangkan fungsi-fungsi politik yang ada dalam setiap sistem politik dapat dibagi dalam 2 bagian: fungsi *input*, yaitu (artikulasi/me

<sup>16</sup> Hamanto, *Sistem Politik Suatu Demokrasi Liberty*, Yogyakarta, 1982, hal:09

kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, komunikasi politik dan rekrutmen politik) dan fungsi *output*, yaitu (pembuatan, penerapan, serta penghakiman kebijakan).

#### **4. Sarana Komunikasi Politik**

Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini akan menjadi sarana komunikasi politik yang akan menghubungkan kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dengan demikian sarana komunikasi adalah alat yang diharapkan akan memudahkan penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan dengan harapan tujuan yang diinginkannya dapat tercapai. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa Donoharjo menjadi sarana komunikasi politik terhadap pemerintah desa dan diharapkan mampu sebagai alat untuk menyerap, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat desa Donoharjo aspirasi dan secara tidak langsung mampu meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat.

Sebagai elemen penting yang dianggap bisa menjadi motor penggerak demokratisasi desa, kehadiran dan kinerja BPD ternyata masih dilingkupi sejumlah problem kontradiktif yang berpotensi menjadi bumerang bagi proses demokratisasi ditingkat desa. Harapan BPD agar mampu langsung bernilai secara

...melihat secara umum bahwa masyarakat memiliki

Masalah lain yang muncul ditingkat desa adalah adanya intervensi dari Kepala Desa terhadap BPD, mulai dari rekrutmen sampai pada proses pembentukan BPD. Intervensi ini bisa dilihat sebagai bentuk ekspresi kekhawatiran Kepala Desa terhadap BPD yang dianggap bisa memiliki kekuasaan politik yang lebih besar darinya. Tentu saja ini adalah pendapat yang salah kaprah, karena dalam Perda Kab Sleman No.1 Tahun 2007 kedudukan BPD adalah sebagai mitra kerja Kepala Desa yang kedudukannya sejajar dengan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Peningkatan partisipasi masyarakat biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, keadaan ekonomi dan status sosial.

Paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu: Modernisasi, perubahan-perubahan struktur kelas, pengaruh kaum intelektual, komunikasi massa modern, konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik dan keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.<sup>17</sup>

Konteks komunikasi politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa Badan Permusyawaratan Desa Donoharjo merupakan sarana komunikasi politik yang mempertemukan antara masyarakat desa Donoharjo dengan pemerintah desa Donoharjo atau sebaliknya. Sarana komunikasi itu lebih dari sekedar titik penghubung, tetapi terdiri atas pengertian tentang siapa yang dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam situasi bagaimana dan sejauh mana loyalitasnya kepada pihak yang diwakilinya.

---

<sup>17</sup> Myron Weiner dalam Mohtar Mas' oed & Collin Mac Andrew, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal 45.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus dapat memberikan nilai tambah kepada pengetahuan kita tentang fenomena individual, organisasi, sosial dan politik.

Menurut *Robert K Yin*, penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu:

1. Studi kasus deskriptif
2. Studi kasus eksplanatoris
3. Studi kasus eksploratoris.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bertipe deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini bermaksud membuat deskripsi mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.

Penelitian deskriptif juga dapat diartikan sebagai tertujunya pada suatu pemecahan masalah yang ada pada masa yang sekarang dengan berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisa hubungan sebab akibat, yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan sesuatu atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut *Kartono* metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dari suatu sifat-sifat individual, keadaan gejala, serta yang menerangkannya sebab masalah dari suatu gejala dengan yang lainnya dalam masyarakat.<sup>20</sup> Studi kasus dirasa cocok untuk penelitian ini, dimana

<sup>18</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hal

<sup>19</sup> Sunadi Suryobrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1992, hal:139-140.

<sup>20</sup> Kartono, *Kepercayaan, Persepsi, Metodeologi, Riset Sosial, Mender, Mulu, Bandung*, 10

penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan faktor penghambat serta penunjang Badan Permusyawaratan Desa sebagai sarana komunikasi politik dalam menyerap aspirasi masyarakat di desa Donoharjo.

## **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Lokasi Penelitian berada di desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Peneliti Mengambil Lokasi ini dengan pertimbangan bahwa di desa Donoharjo sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa, namun fungsi dan perannya belum diketahui oleh masyarakat secara luas. Sehingga, perlu adanya sosialisasi mengenai fungsi dan peran dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Selain itu, peneliti mengambil lokasi di desa Donoharjo dengan alasan:

- a. Agar Badan Permusyawaratan Desa Donoharjo dapat lebih meningkatkan peran dan fungsinya secara lebih konkrit dan konsekuen.
- b. Agar Badan Permusyawaratan Desa Donoharjo dapat melaksanakan hak dan wewenang yang dimilikinya secara maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Peneliti mefokuskan penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai sarana komunikasi politik di desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Penelitian ini dimulai pada tanggal 3 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 27 Mei 2008.

### 3. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapat dengan beberapa cara.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah:

#### a. Sumber data langsung (primer)

Yaitu merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian, perorangan, kelompok dan organisasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Aparat pemerintahan desa Donoharjo. Yaitu: Kepala Desa dan Sekretaris Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan beberapa masyarakat desa Donoharjo yang mengetahui tentang fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa.

#### b. Sumber data tidak langsung (sekunder)

Yaitu merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi, instansi, atau perusahaan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data-data yang diperlukan tersebut adalah:

#### a. *Interview*/Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara, berkomunikasi langsung untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Kepala De

Desa, anggota BPD, dan beberapa masyarakat desa Donoharjo, dengan kriteria laki-laki yang berumur 30 s/d 60 tahun, yang mengetahui keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dan berdomosili di desa Donoharjo. Peneliti hanya mewawancarai informan dari sebagian masyarakat Donoharjo yang berjenis kelamin laki-laki dengan asumsi, bahwa yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan dan rapat-rapat penjangkaran aspirasi masyarakat ditingkat RT, RW dan Pedukuhan adalah warga yang berjenis kelamin laki-laki.

**b. Observasi**

Observasi adalah suatu metode penelitian dengan cara mengamati secara langsung lokasi penelitian, yaitu di desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

**c. Studi Kepustakaan/Dokumentasi**

Teknik studi kepustakaan/dokumentasi adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang dilakukan dengan kategori bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun dari buku-buku, jurnal, majalah, dll.

**5. Teknik Analisis Data**

Strategi umum yang digunakan adalah mengembangkan kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan studi kasus atau deskriptif kasus. Data





dalam bab III penulis menyajikan data-data yang merupakan hasil penelitian dari wawancara anggota Badan Permusyawaratan Desa, Aparat desa dan masyarakat desa Donoharjo, serta menjelaskan analisis data yang bahannya diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung. Kemudian dari data-data tersebut dihubungkan dengan kerangka teori yang sudah tertera di bab I.

Skripsi ini diakhiri pada bab IV yang terangkum dalam kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan pada skripsi ini menjelaskan hasil dari penelitian yang diperoleh peneliti dan pada sub bab saran, peneliti berusaha memberikan alternatif penilaian kepada Badan Permusyawaratan Desa Donoharjo.